

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2016**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

**Jl. Dr. Suparno No. 32 Telpn (0281) 636 079
PURWOKERTO**

Ikhtisar Eksekutif

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, serta dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka pelaksanaannya di tindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dengan berakhirnya tahun anggaran 2016, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas sebagai SKPD berkewajiban untuk menyusun LKjIP tahun 2016.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2010, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas melaksanakan 1 (satu) tugas pokok dan 4 (empat) fungsi. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut kemudian dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan tahun 2016 yang dibiayai melalui dana APBD Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Banyumas sejumlah **Rp.37.821.991.886,-** (*Tiga puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*) terealisasi **Rp. 10.145.802.999,-** (*Sepuluh milyar seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) atau dengan total serapan 27% (kurang baik) hal ini terbebani dari **belanja tidak langsung (Non program/gaji)** dengan pagu anggaran **Rp.34.141.991.886,-** terealisasi Rp. **6.937.448.603,-** atau 20,32% dengan serapan belanja tidak langsung (gaji) masih sisa Rp.27.204.543.283,- atau 392% yaitu untuk cadangan penggajian PNS yang mutasi masuk ke Kabupaten Banyumas dan yang tidak terserap yaitu anggaran untuk penggajian pengadaan CPNS Bidan PTT dari Kementerian Kesehatan dan tenaga harian lepas tenaga harian pembantu Penyuluh Pertanian yang sudah mengikuti tes seleksi CPNS dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian tetapi sampai akhir tahun anggaran belum ada pengumuman penetapan CPNS yang lulus biarpun sudah ada MOU dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan dua Kementerian

tersebut. Dan untuk **belanja Ingsung (belanja program/kegiatan)** dengan pagu anggaran Rp.3.680.000.000,- terealisasi Rp. 3.207.732.328,- dari 4 program dan 22 kegiatan dengan serapanya 87% (cukup baik) dan sisi anggaran Rp. 472.267.672 atau 14,7%. Dari belanja tersebut dapat diuraikan dengan pos-pos belanja sebagai berikut :

I. Belanja berdasarkan klasifikasi umum belanja.

1. Belanja Operasi.

a. Belanja Pegawai pagu anggaran sebesar Rp. 34.937.283.886,- terealisasi sebesar Rp 7.626.927.103,-

b. Belanja Barang Jasa pagu anggaran Rp.2.679.708.000,- terealisasi Rp. 2.325.690.000,-

2. Belanja Modal.

Pagu anggaran Rp.205.000.000,- terealisasi Rp.193.185.000,-

II. Belanja berdasarkan program-kegiatan.

Pagu anggaran Rp. 3.680.000.000,- terealisasi Rp. 3.208.286.896,- atau 87%.

Berdasarkan hasil pengukuran *capaian dan evaluasi kinerja* Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2016 dengan nilai capaian akhir kegiatan sebesar **96,5 %**, maka dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Kondisi ini dipengaruhi oleh capaian kinerja masing-masing kegiatan yang rata-rata sangat baik, dimana pencapaian kegiatan yang capaian kinerjanya tinggi yaitu Pembinaan dan penyelesaian permasalahan PNS 99% dengan sub kegiatan pembinaan di unit kerja, fasilitasi pemrosesan Taperum, fasilitasi LHKPN, pemrosesan pemberian ijin/keterangan untuk melakukan perceraian, pemrosesan penjatuan hukuman disiplin dan melakukan SIDAK pada jam kerja efektif .

Sedangkan untuk program kegiatan yang lain capaian indikator kinerjanya rata-rata sangat baik. Hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis BKD untuk menunjang visi misi Bupati periode 2013-2018.

Adapun sasaran serta hasil pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2016 dihitung dari indikator input,output dan outcome adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang konseptual, teknis dan fungsional dengan indikator kinerja :
 - a). Peningkatan kemampuan petugas dalam menyelesaikan masalah kepegawaian di unit kerja dengan pencapaian kinerja 99% .
 - b). Meningkatnya kualitas SDM dengan pengembangan aparatur pencapaian kinerja 93% dengan pengiriman PNS yang memenuhi syarat guna mengikuti Diklat, tugas belajar, pemberian ijin belajar, keterangan belajar, keterangan pendidikan, keterangan penggunaan gelar dan ujian kedinasan melalui ujian tingkat I dan II, serta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah serta uji kompetensi (assesment).
 - c). Penyusunan formasi dan pengisian kebutuhan pegawai sesuai formasi melalui penyusunan formasi pada unit kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS dan sumpah janji PNS serta pembuatan aplikasi e-Formasi dengan capaian 83%
- 2) Meningkatkan kesejahteraan dan tertib administrasi pegawai dengan indikator kinerja :
 - a). Terlaksananya pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas dengan capaian 96%.
 - b). Terbitnya SK kenaikan pangkat (KP) dan peninjauan masa kerja golongan (PMK) tepat waktu dengan capaian 91%.
 - c). Terlaksananya penerbitan SK pensiun dan penataan PNS dengan capaian 96%.
 - d). Fasilitasi penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat pejabat fungsional non guru dan non bidang kesehatan dengan capaian kegiatan 90%.
 - e). Terlaksananya pengelolaan tertib administrasi PTT dengan capaian 95% yaitu untuk penerbitan Surat Perpanjangan Kontrak Kerja penyesuaian honor PTT 23 orang, Pemrosesan SK Pemberhentian PTT sudah batas pensiun 8 orang.
 - f). Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dengan capaian 99%.

- 3) Meningkatkan kualitas penempatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional dengan indikator :

Pengisian jabatan sesuai dengan kekosongan jabatan struktural dengan pengangkatan / pemindahan dalam jabatan struktural sebanyak 1239 PNS, sedangkan jabatan fungsional dan pengisian kepala sekolah sebanyak 602 PNS melebihi target yang ditetapkan hal tersebut juga karena adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yaitu dengan pengisian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) baru maka keseluruhan capaian kinerjanya sebesar 97% .

- 4) Penyelesaian permasalahan kepegawaian dengan indikator: Pembinaan dan penyelesaian masalah kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan capaian 99% untuk pembinaan pegawai di unit kerja, penyelesaian khusus pemrosesan penjatuhan hukuman disiplin mendasari PP 53 Tahun 2010 dan penyelesaian kasus yang berkaitan dengan PP 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan keterangan/ijin perceraian bagi PNS, LHKPN, fasilitasi pencairan Tabungan perumahan (Taperum) dan SIDAK untuk pembinaan pada jam kerja efektif di unit kerja.

- 5) Ketersediaan data pegawai yang akurat dan up to date dengan indikator :

a) Tersedianya data kepegawaian yang akurat dan update melalui aplikasi sistem informasi kepegawaian dengan capaian 96% untuk update data kepegawaian dari unit kerja, menyusun informasi kepegawaian (profil kepegawaian), fasilitasi pemrosesan KPE dan fasilitasi pemrosesan Karpeg dan Karis-Karsu .

b) Terlaksananya pengelolaan arsip PNS dan CPNS melalui pemeliharaan dan penataan file kepegawaian dengan capaian 91%,

- 6) Pengembangan aplikasi program SIMPEG untuk anggaran tahun 2016 tidak ada pengembangan.

Dan untuk pelaksanaan atau fasilitasi kegiatan internal SKPD sebagai unsur pendukung dari 6 sasaran yaitu dengan program peningkatan kualitas

pelayanan administrasi perkantoran dengan 5 kegiatan capaian kinerja sebesar 97,8% dan pemenuhan sarana prasarana aparatur dengan 4 kegiatan capaian kinerja sebesar 95,1% untuk pelaksanaan 1 tahun anggaran 2016.

Dari 6 (enam) sasaran capaian dari *Indikator Kinerja Utama (IKU)* BKD dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur rata-rata dengan capaian 97,1 % (sangat baik) capaian tersebut diukur dari 3 (tiga) indikator.
2. Capaian kinerja sasaran peningkatan kesejahteraan dan tertib administrasi pegawai rata-rata dengan capaian 94,5% (sangat baik) capaian tersebut diukur dari 6 (enam) capaian indikator kinerja tersebut telah memenuhi target.
3. Capaian kinerja sasaran peningkatan kualitas penempatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional dengan capaian kinerja rata-rata 97% (Sangat baik) dengan 1 (satu) indikator capaian kinerja tersebut telah memenuhi target.
4. Capaian kinerja sasaran penyelesaian permasalahan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan capaian kinerja rata-rata 99% (sangat baik) dengan pembinaan PNS dan sosialisasi PP, 53 Tahun 2010 dan PP, 46 Tahun 2012, serta fasilitasi pencairan Tabungan Perumahan, LHKPN dan Sida pegawai.
5. Capaian kinerja data kepegawaian yang akurat dan up to date dengan capaian kinerja rata-rata 93,5% (Sangat baik), dengan 2 (dua) indikator capaian kinerja tersebut telah memenuhi target.
6. Capaian Kinerja pendukung sasaran pada IKU, dengan program dan kegiatan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran pencapaian kinerja sebesar 98%.(Sangat baik) dengan efisiensi pada belanja BBM operasional, belanja rekening listrik, belanja rekening internet/kawat, belanja publikasi/dekorasi, sewa gedung/kursi dan pengendalian penatausahaan keuangan daerah penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan untuk peningkatan sarana prasarana aparatur dengan capaian kinerja 95% (sangat baik) dengan efisiensi pada belanja pemeliharaan

aset tetap peralatan dan mesin karena sebagian besar aset tetap dan mesin dalam kondisi cukup baik.

Secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik, sedangkan kendala atau permasalahan dengan bidang tugas dan fungsi BKD yaitu berkenaan dengan upaya **peningkatan kompetensi aparatur sipil negara** dan **distribusi atau penataan pegawai** baik dari segi kuantitas maupun kualitas, hal tersebut sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.26 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala BKN No.19 Tahun 2011 tentang Penghitungan Kebutuhan Pegawai, Peraturan Kepala BKN No 37 Tahun 2011 tentang Penataan PNS, dan Peraturan Kepala BKN No.22 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyusunan Pengembangan PNS. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan SDM Aparatur juga mendasari Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas secara bertahap sudah mulai menyusun tahapan penataan PNS melalui menyusun E-Formasi secara online ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sedangkan untuk penataan pegawai juga harus diawali dengan pelaksanaan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan dengan pemberian penamaan jabatan pada setiap fungsional umum yang ada dan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.

Selain itu keberhasilan pelaksanaan program kegiatan juga ditopang dari kondisi keuangan daerah, dan secara umum kelanjutan penyelesaiannya pelaksanaan tugas dan fungsi BKD dapat berjalan dengan baik walaupun sebagian kegiatan teknis pelayanan bidang kepegawaian ditopang atau difasilitasi oleh program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan program Peningkatan Saranan dan Prasaranan Aparatur kegiatan Ketatausahaan. Kedepan dengan semakin baiknya kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang ada diharapkan kegiatan teknis dapat didukung dengan pembiayaan kegiatan tersendiri karena akan berpengaruh terhadap rencana capaian indikator kinerja baik sasaran maupun program yang akan dicapai pada tahun bersangkutan.

KATA PENGANTAR

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Maksud Akuntabilitas Kinerja dalam Instruksi Presiden ini adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP harus dilandasi dengan pengertian dan kesadaran bahwa laporan akan dapat bermanfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih dan produktifitas dilingkungannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2016 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban Kepala BKD Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan kebijakan program kerja/kegiatan sebagaimana tugas dan fungsi yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas.

Hal yang paling utama untuk diinformasikan dalam LKjIP adalah yang mencakup capaian kinerja tahun berjalan yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana tahun tersebut. Suatu rencana kinerja akan sangat bermanfaat untuk mengukur kinerja pelaksanaan program atau kegiatan instansi. Pengukuran kinerja ini akan langsung dapat dilakukan karena target yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja dapat dipakai sebagai alat pembanding dalam pengukuran. Dalam melakukan pengukuran kinerja alat pembanding menjadi sangat penting, karena alat pembanding itulah yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk pengukuran.

Tolok ukur itu akan sangat berguna untuk membandingkan antara harapan dan fakta yang terjadi. Sehingga dengan demikian kita dapat menentukan apakah kemajuan yang ada telah melampaui harapan atau

belum. Melalui pengukuran dan evaluasi kinerja, keberhasilan suatu instansi akan dilihat dari kemampuan melaksanakan program-programnya berdasarkan sumber daya yang dikelolanya, untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam usaha pencapaian tujuan, karena melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan pengukuran kinerja dapat memberikan penilaian (justifikasi) yang obyektif dalam pengambilan keputusan organisasi maupun manajemen. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik (*feed back*) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Kegiatan lebih lanjut dari pengukuran kinerja yaitu evaluasi kinerja, yang merupakan salah satu perwujudan dari akuntabilitas kinerja pemerintah. Evaluasi kinerja adalah suatu upaya yang sistematis untuk mengumpulkan data dan informasi yang obyektif mengenai realisasi hasil, manfaat dan dampak yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi proses pengambilan keputusan dan penyempurnaan kegiatan berikutnya. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kerja/kegiatan kiranya dapat dijadikan pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja dan berusaha memperbaiki kekurangan - kekurangan yang ada sehingga pada tahun berikutnya menjadi lebih baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas ini semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Desember 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Drs. ACHMAD SUPARTONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620708 198503 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
I. PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
B. Latar Belakang Penyusunan LKjIP.....	6
C. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP	7
D. Sistematika Penyusunan LKjIP.....	7
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	11
A. Rencana Kerja Tahun 2016	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	19
III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Pengukuran Kinerja.....	26
B. Analisis Hasil Pengukuran Kinerja	49
C. Akuntabilitas Keuangan	55
IV. PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah tersebut diatas merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan tugas dan fungsi tertuang pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas, dimana BKD Kabupaten Banyumas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKD Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup kepegawaian daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup kepegawaian daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup kepegawaian daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 6 (enam) Kepala Sub Bidang dan Staf Pelaksana/Kelompok Jabatan Fungsional Umum merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dan dengan sumber daya yang dimiliki, instansi pemerintah diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan informasi kinerja secara tertulis, periodik, dan

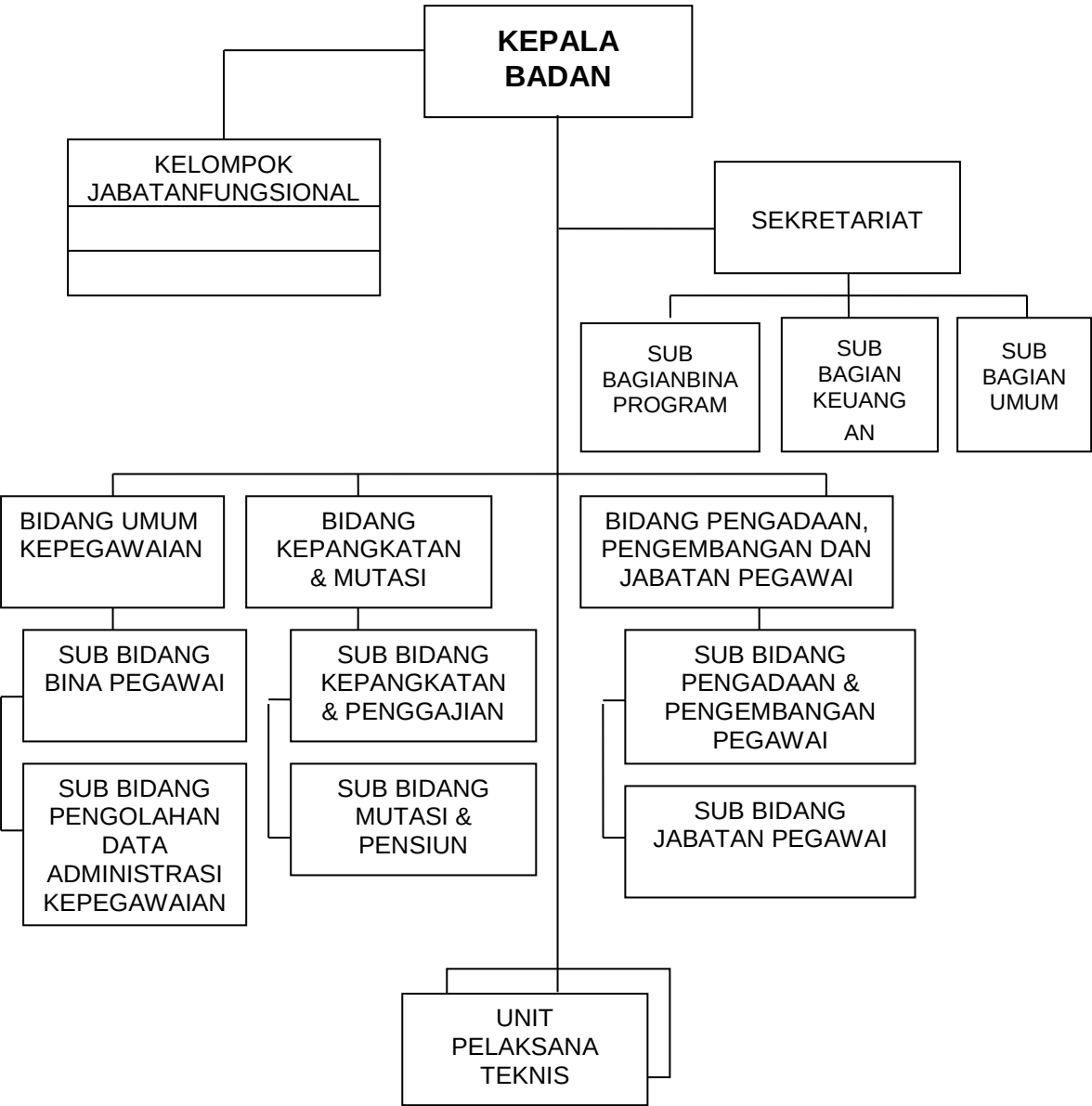
melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggungjawaban laporan kinerja dalam satu tahun anggaran (tahunan) yang telah ditetapkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja instansi pemerintah yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran.

Susunan dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Umum Kepegawaian, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Bina Pegawai;
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data Administrasi Kepegawaian.
4. Bidang Kepangkatan dan Mutasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian ;
 - b. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun.
5. Bidang Pengadaan, Pengembangan dan Jabatan Pegawai, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai;
 - b. Sub Bidang Jabatan Pegawai;
6. UPT;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 27 TAHUN 2009:



Kondisi Kepegawaian, Sarana dan Prasarana

Adapun kondisi kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan golongan, jenis kelamin dan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

Gol. Ruang	PNS	CPNS	Jenis Kelamin		Pendidikan					
			L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
JML	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
II/a	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
II/b	4	-	3	1	-	-	4	-	-	-
II/c	5	-	4	1	-	-	5	-	-	-
II/d	9	-	3	6	-	-	-	9	-	-

JML	19	0	11	8	0	0	10	9	0	0
III/a	13	-	7	6	-	-	1	3	9	-
III/b	26	-	22	14	-	-	8	1	16	1
III/c	27	-	16	11	-	-	-	1	24	2
III/d	13	-	3	10	-	-	-	-	11	2
JML	79	0	48	41	0	0	9	5	60	5
IV/a	4	-	3	1	-	-	-	-	2	2
IV/b	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
IV/c	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JML	6	0	5	1	0	0	0	0	2	4
TOTAL	105	0	65	50	0	1	19	14	62	9

JUMLAH ESELON :

IV.B	IV.A	III.B	III.A	II.B	II.A
-	9	3	1	1	-

Bahwa dari 105 PNS yang ada di BKD yang sebagai PNS organik (yang bekerja di BKD) 57 orang, PNS tugas belajar 44 orang dan yang diperbantukan di KPU 4 orang. (data 31 Desember 2016).

Secara umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas kondisi sarana prasarana yang ada cukup memadai, antara lain :

**JUMLAH BARANG INVENTARIS
BKD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016**

No.	Nama Barang	Jumlah Barang / Luas Bangunan	
I.	TANAH		
1	Tanah bangunan kantor	8.185	M ²
II.	GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	Bangunan gedung kantor sebelah (Utara)	6.153	M ²
2	Bangunan gedung kantor dan aula sebelah (Selatan)	288	M ²
III.	PERALATAN DAN MESIN		
1	AC	34	buah
2	Amplifier	1	buah
3	Alat pemadam	8	buah
4	Alat penghancur kertas	2	buah
5	Alat penyimpanan lain-lain (kotak penyimpan)	1	buah
6	Aplikasi Simpeg	1	paket
7	Brandkas	4	buah
8	Buffet kayu	1	buah
9	Calisboard rk hollow	1	unit
10	Central telepon	1	buah
11	Dispenser	19	buah
12	DVD writer	2	buah
13	Exhouse fan	2	buah
14	Faximile	2	buah

15	Filing kabinet	28	buah
16	Flasdisk	6	buah
17	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4	buah
18	Genset	1	buah
19	Gordyn	36	buah
20	Handycam	1	buah
21	Hardisk	2	buah
22	HUB	2	buah
23	Jagrag bendera	2	buah
24	Jam dinding/elektronik	22	buah
25	Kaca hias	10	buah
26	Kain gordyn corduroy	1	unit
27	Kalkulator	18	buah
28	Kamera digital	1	buah
29	Kanopi	1	set
30	Keyboard	2	buah
31	Kipas angin	8	buah
32	Kompor gas	1	buah
33	Kursi kayu/rotan	85	buah
34	Kursi lipat	189	buah
35	Kursi putar	37	buah
36	Kursi susun	20	buah
37	Kursi tangan	13	buah
38	Kursi tunggu	4	buah
39	Lambang Garuda Pancasila	2	buah
40	Latomap folder	149	buah
41	Layar proyektor	2	buah
42	Lemari besi 2 pintu	2	buah
43	Lemari besi/metal	22	buah
44	Lemari besi roll O pack	35	buah
45	Lemari es	2	buah
46	Lemari kaca	2	buah
47	Lemari kantor 2 pintu	1	buah
48	Lemari kayu	7	buah
49	Lemari kayu ukir	1	buah
50	Lemari kunci	1	buah
51	Lemari pintu sorong	2	buah
52	Megaphone	1	buah
53	Meja 1/2 biro	74	buah
54	Meja kayu/rotan	4	buah
55	Meja komputer	36	buah
56	Meja kursi tamu	8	buah
57	Meja resepsionis	1	buah
58	Meja rapat	44	buah
59	Meja telepon	1	buah
60	Meja tik	4	buah
61	Meja tulis	6	buah
62	Mesin ketik	14	buah
63	Mesin penghisap debu	1	buah
64	Mimbar/podium	1	buah
65	Mix dan standar	2	buah
66	Monitor	2	buah
67	Mouse	9	buah
68	Mobil	6	buah
69	Notebook/Laptop	45	buah
70	Overhead proyektor	1	buah
71	Papan tulis	2	buah

72	Peralatan jaringan komputer VPN IP 128	1	paket
73	Personal Computer (PC) unit	55	buah
74	PC Tablet	16	buah
75	Pesawat telepon	1	buah
76	Pigura hadist nabi	1	buah
77	Pompa air	3	buah
78	Pot bunga	12	buah
79	Printer	64	buah
80	Proyektor	4	buah
81	Radio	2	buah
82	Radio antar ruangan	1	buah
83	Rak besi/metal	35	buah
84	Rak kayu	10	buah
85	Rolingdoor aluminium	1	unit
86	Router	1	buah
87	Scanner	5	buah
88	Sekat ruangan	2	buah
89	Sepeda motor	24	unit
90	Server	2	buah
91	Sound system	1	buah
92	Stabilisator	3	buah
93	Standar mic duduk	5	buah
94	Switch 24 port	1	buah
95	Tabung gas	1	buah
96	Tangga aluminium	1	buah
97	Taplak batik/bordir/meja	50	buah
98	Telepon (PABX)	10	buah
99	Televisi	3	buah
100	UPS	30	buah
101	Vertical blind	1	unit
102	Vidoe kamera	1	buah
103	Vacum Cliner	1	buah
104	Water turn	1	buah
105	Website BKD	1	paket
106	Whiteboard	15	buah
107	Windows server 2003	2	unit
108	Wirelles	2	buah
IV.	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN		
1..	Instalasi dan Daya Listrik	2	Jaringan
V.	ASET TETAP LAINNYA		
1	Alat fitnes	2	buah
2	Buku perpustakaan	75	buku

B. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN LKjIP

Dengan diterbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan

peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP tersebut disusun berdasarkan dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2016 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja tahun 2016. LKjIP juga dimaksudkan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah dan pada umumnya Pemerintah Kabupaten Banyumas serta mendorong menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance).

C. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKjIP

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme , sebagai tindak lanjut dari Tap MPR;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

IHTISAR EKSEKUTIF

Bab. I PENDAHULUAN

- A.. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi.
- B. Latar Belakang Penyusunan LKjIP.
- C. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP.
- D. Sistematika Penyusunan LKjIP.

Bab II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
	A. Perencanaan Kinerja.
	B. Perjanjian Kinerja.
Bab. III	AKUNTABILITAS KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015
	A. Pengukuran Kinerja.
	B. Analisis Hasil Pengukuran Kinerja.
	C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di bidang manajemen kepegawaian Kabupaten Banyumas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah;

Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas adalah *“Mewujudkan Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas yang Bermoral, Kompetitif dan Profesional.”*

Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas adalah :

 - a) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah dan dengan cermat mengelola penggunaan sumber daya manusia tersebut;
 - b) Mengakui performa dan prestasi pada semua tingkatan dan menciptakan lingkungan kerja profesional yang memberikan jalan bagi pemenuhan diri serta pengembangan karier aparatur pemerintah daerah;
 - c) Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian;
2. Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bermoral, kompetitif dan profesional menuju terciptanya prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia aparatur;
	Meningkatkan kesejahteraan dan tertib administrasi pegawai;
	Meningkatkan Kualitas Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional;
	Terselesaikannya masalah kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
	Tersedianya data kepegawaian yang akurat dan <i>up to date</i> ;
	Terlaksananya aplikasi program SIMPEG.

3. Kebijakan

Adapun arah kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas adalah Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur PNS di Kabupaten Banyumas.

4. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran BKD Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 dilaksanakan melalui program dan kegiatan Adapun program dan kegiatan tahun 2016 yang dilaksanakan adalah :

No	Program	Kegiatan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. 2. Penyediaan bahan logistik kantor. 3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 4. Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan. 5. Pengendalian dan penatausahaan keuangan daerah.
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. 2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor. 3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional. 4. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. BinteK Penyelesaian Kasus Kepegawaian
3	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi. 2. Akurasi data CPNS dan PNS. 3. Pemrosesan jabatan fungsional dan jabatan struktural. 4. Pembinaan dan penyelesaian masalah PNS. 5. Pemrosesan pensiun dan penataan PNSD. 6. Pemrosesan kenaikan pangkat PNSD. 7. Pengelolaan administrasi PTT. 8. Pengelolaan arsip CPNS dan PNS. 9. Pengembangan Sumber Daya Aparatur. 10. Penyusunan penilaian dan penetapan angka

		kredit Jabatan Fungsional Non Guru dan Non Bidang Kesehatan. 11.Penyusunan Formasi dan pengadaan pegawai. 12.Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas
--	--	--

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Kinerja

Rencana kinerja dapat didefinisikan sebagai analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa datang. Menurut SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003, Perencanaan Kinerja diartikan sebagai proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan .

Perencanaan kinerja tahun 2016 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2013-2018 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2013-2018 dan mengacu pula pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala SKPD yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kepegawaian atau aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertera dalam RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah periode tahun 2013-2018 dengan Visi BKD Kabupaten Banyumas adalah ” *Mewujudkan Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas yang Bermoral, Kompetitif dan Profesional.*”

Untuk mewujudkan Visi tersebut di jabarkan dalam Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas adalah :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah dan dengan cermat mengelola penggunaan sumber daya manusia tersebut;
2. Mengakui performa dan prestasi pada semua tingkatan dan menciptakan lingkungan kerja profesional yang memberikan jalan bagi pemenuhan diri serta pengembangan karier aparatur pemerintah daerah;
3. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian;

Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam 1 tujuan dan 6 sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Adapun arah kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas adalah Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur PNS di Kabupaten Banyumas.

Sedangkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bermoral, kompetitif dan professional menuju terciptanya prinsip-prinsip <i>good governance</i>	a. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia aparatur dibidang konseptual, teknis dan fungsional	1. Meningkatnya pemahaman petugas dalam menyelesaikan permasalahan kepegawaian
			2. Terlaksananya Pengembangan sumber daya aparatur melalui Diklat dan sejenisnya, tugas belajar, ijin belajar keterangan belajar, keterangan pendidikan, ujian kedinasan (kenaikan tingkat I dan II serta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah dan uji kopetensi)
			3. Terasilinasinya penyaringan Calon Praja IPDN tingkat kabupaten
			4. Penyusunan formasi dan pengadaan pegawai.
		b. Meningkatkan kesejahteraan dan tertib administrasi pegawai;	1. Pembelakalan PNS yang akan memasuki purna tugas
			2. Terbitnya petikan SK kenaikan pangkat dan SK peninjauan masa kerja golongan PNS

			3. Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun tepat waktu dan fasilitasi mutasi PNS
			4. Terfasilitasi penilaian penetapan angka kredit jabatan fungsional (non guru dan Non bidang kesehatan)
			5. Terwujudnya tertib administrasi PTT
			6. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi.
		c. Meningkatkan Kualitas Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional;	1. Pengisian jabatan sesuai dengan formasi dan pengukuran kompetensi jabatan struktural
			2. Penataan dan pengembangan karir secara proporsional
		d. terselesaikannya masalah kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Pembinaan PNS
			2. Penyelesaian SK ijin perkawinan dan perceraian
			3. Penyelesaian SK penjatuhan hukuman disiplin
			4. Pelaksanaan Sidak
		e. Adanya data kepegawaian yang akurat dan up to date;	1. Tersedianya data PNS dan CPNS yang akurat dan up to date melalui aplikasi SIMPEG

			(file/data pegawai)
			2. Penataan dan pemeliharaan arsip PNS dan CPNS.
		f. Terlaksananya pengembangan aplikasi program SIMPEG	1. Penyempurnaan program Simpeg sesuai dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan data

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dibidang kepegawaian di dalam sasaran *RPJM 2013-2018* yaitu *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur* yang dilaksanakan dengan *strategi* :

1. Penerapan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan partisipatif;
2. Pengembangan kemampuan aparatur daerah untuk berinovasi.

dangan *arah kebijakan pembangunan* melalui:

1. Peningkatan budaya kerja aparatur yang profesional yang bebas korupsi,kolusi dan nepotisme;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur.

Adapun Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

**RENCANA KERJA TAHUNAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan sarana prasarana kantor.	- Terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun. - Terpenuhinya penyediaan logistik kantor dalam 1 tahun. - Tersedianya tenaga	12 bulan

	administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan kantor. - Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi. - Terlaksananya pengendalian dan penatausahaan keuangan dengan jasa administrasi keuangan. - Terselenggaranya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. - Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor. - Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. - Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.	
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dibidang konseptual, teknis dan fungsional	Meningkatnya kualitas SDA aparatur melalui Diklat, Tugas Belajar, Ijin Belajar, Ujian Dinas Tingkat I dan II, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah dan PNS yang dapat dioptimalkan dalam formasi-formasi yang lebih strategis.	Peningkatan kualitas SDM aparatur 506 orang melalui kegiatan : - Pengajua PNS ijin belajar, keterangan belajar dan keterangan pendidikan 100 orang. - Pengajuan PNS penggunaan gelar 100 orang - PNS yang mengikuti seleksi tugas belajar dan PNS tugas belajar 53 orang. - Diklat dan sejenisnya 150 orang. - Ujian kedinasan 100 orang.
	Terlaksananya penghitungan formasi	Dengan 5 kegiatan :

	dan pelaksanaan pengadaan pegawai.	- Penyusunan formasi PNS sebanyak 259 unit kerja. - Seleksi penerimaan CPNS 890 orang. - Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan sumpah janji PNS 575 orang - Sumpah janji PNS bagi PNS yang belum di sumpah 125 orang.
Meningkatkan kesejahteraan dan tertib administrasi pegawai	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS untuk peningkatan prestasi dan peningkatan kinerja pelayanan.	- Penghargaan PNS yang berprestasi 15 orang - Penghargaan Satya Lancana karya satya 150 orang.
	Terfasilitasinya kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun tepat waktu serta penataan/mutasi PNS.	Pemrosesan kenaikan pangkat pengabdian, pensiun tepat waktu dan pemrosesan mutasi/penataan PNS 600 terdiri dari : - Pensiun 400 orang. - Mutasi 200 orang
	Terbitnya petikan SK kenaikan pangkat PNS dan petikan SK peninjauan masa kerja golongan.	- Kenaikan pangkat 3.000 orang - Peninjauan masa kerja golongan 20 orang
	Terfasilitasinya penilaian penetapan angka kredit PNS	22 kegiatan
	Tertibnya pengelolaan administrasi PTT	Pengelolaan administrasi PTT 28 orang. Melalui : - Pemberian pesangon pemberhentian PTT yang memasuki BUP 9 orang. - Terbitnya SK inpassing /

		penyesuaian honor PTT tahun 2016, 23 PTT.
	Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas	Pemberian pembekalan mental sepiritual bagi PNS yang akan purna tugas 120 orang.
Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian masalah kepegawaian.	Penyelesaian permasalahan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	- Pelaksanaan pembinaan di unit erja 27 kegiatan. - Pemrosesan usulan permohonan. Bapertarum 59 orang. - Fasilitasi LHKPN 4 kegiatan. - Keputusan pemberian ijin untuk melakukan perceraian 30 kasua/SK. - keterangan untuk melakukan perceraian 30 kasus - SK penjatuhan hukuman disiplin 30 kasus/SK. - Keputusan permintaan ijin beristeri lebih dari satu. 3 kasus.
Meningkatkan kualitas penempatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional.	Penempatan pegawai sesuai kompetensinya dengan pengisian jabatan sesuai formasi, berdasarkan pada pembinaan sistim karir yang terbuka.	Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional 1.600 orang terdiri dari : - Pengisian jabatan struktural 400 orang. - Penataan jabatan fungsional 1.200 orang.

Tersedianya data kepegawaian yang akurat dan up to date	Tersedianya data PNS dan CPNS.	4 kegiatan terdiri : - Entri up date data 15.000 pegawai. - Permohonan pemrosesan Konversi NIP. 2 SK - Fasilitas/pemrosesan pembuatan KPE 100 kartu - Fasilitas/pemrosesan Karpeg, Karis-Karsu 500 pegawai.
	Tertata dan terpeliharanya arsip/file kepegawaian.	15.000 orang/arsip

B. Perjanjian Kinerja.

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah telah melakukan perjanjian kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati Banyumas melalui penyusunan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (Tapkin / PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2013-2018.

Rincian penetapan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2016 adalah dapat dilihat pada tabel Penetapan kinerja sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA 2016

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Program	Anggaran awal (Rp)	Anggaran perubahan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4		5	6		7
1	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan sarana prasarana kantor.	- Terpenuhiya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun. - Terpenuhiya penyediaan logistik kantor dalam 1 tahun. - Tersedianya tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan kantor. - Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi. - Terlaksananya pengendalian dan penatausahaan keuangan dengan	12 bulan	12 bulan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	820.000.000,-	862.400.000	APBD Kab. Banyumas

		jasa administrasi keuangan.						
		- Terselenggaranya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. - Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor. - Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. - Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.	12 bulan	12 bulan	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	340.000.000,-	297.600.000	APBD Kab. Banyumas
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dibidang konseptual, teknis dan fungsional	Meningkatnya kemampuan petugas dalam menyelesaikan kasus kepegawaian	0	172 orang	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	50.000.000	
		Meningkatnya kualitas SDA aparatur melalui Diklat, Tugas Belajar, Ijin Belajar,	Peningkatan kualitas SDM aparatur 506 orang melalui kegiatan :	Peningkatan kualitas SDA aparatur 1269 orang	Pembinaan dan pengembangan aparatur	2.320.000.000,-	2.470.000.000	APBD Kab. Banyumas

		Ujian Dinas Tingkat I dan II, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah dan PNS yang dapat dioptimalkan dalam formasi-formasi yang lebih strategis.	- Pengajua PNS ijin belajar, keterangan belajar dan keterangan pendidikan 100 orang. - Pengajuan PNS penggunaan gelar 100 orang - PNS yang mengikuti seleksi tugas belajar dan PNS tugas belajar 56 orang. - Diklat dan sejenisnya 150 orang. - Ujian kedinasan 100 orang.	100 orang 200 orang 50 orang 83 orang 836 orang				
		Terlaksananya penghitungan formasi dan pelaksanaan pengadaan pegawai.	Dengan 5 kegiatan : - Penyusunan formasi PNS sebanyak 259 unit kerja. - Seleksi penerimaan CPNS 890 orang. - Pengangkatan CPNS menjadi	4 kegiatan 259 unit kerja 0 575 orang				

			PNS dan sumpah janji PNS 575 orang - Sumpah janji PNS bagi PNS yang belum di sumpah 125 orang.	125 orang				
3	Meningkatkan kesejahteraan dan tertib administrasi pegawai	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS untuk peningkatan presatasi dan peningkatan kinerja pelayanan.	- Penghargaan PNS yang berprestasi 15 orang - Penghargaan Satya Lancana karya satya 150 orang.	14 orang 150 orang				
		Terfasilitasinya kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun tepat waktu serta penataan/mutasi PNS.	Pemrosesan kenaikan pangkat pengabdian, pensiun tepat waktu dan pemrosesan mutasi/penataan PNS 600 terdiri dari : - Pensiun 400 orang. - Mutasi 200 orang	400 200				
		Terbitnya petikan SK kenaikan pangkat	- Kenaikan pangkat 3.000	2000 orang				

		pada pembinaan sistim karir yang terbuka.	- Pengisian jabatan struktural 400 orang. - Penataan jabatan fungsional 1.200 orang.	600 orang				
6	Tersedianya data kepegawaian yang akurat dan up to date	Tersedianya data PNS dan CPNS.	4 kegiatan terdiri : - Entri up date data 15.000 pegawai. - Permohonan pemrosesan Konversi NIP. 2 SK - Fasilitasi/pemrosesan pembuatan KPE 100 kartu - Fasilitasi/pemrosesan Karpeg, Karis-Karsu 500 pegawai. - Informasi kepegawaian Profil. 0 buku	5 kegiatan 15.500 orang 10 orang 100 KPE 500 pegawai 16 buku				
		Tertata dan terpeliharanya arsip kepegawaian.	15.000 orang/arsip	15.500 arsip				

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN

BANYUMAS TAHUN 2016

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses tersebut dilaksanakan dengan mengukur capaian setiap indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala	Kategori
91 s/d 100	Sangat Berhasil/sangat baik
71 s/d 90	Cukup Berhasil/cukup baik
55 s/d 70	Kurang Berhasil/kurang baik
Kurang dari 55	Tidak Berhasil/tidak baik

Indikator kinerja sasaran bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian atau pengelolaan sumber daya aparatur yang meliputi aspek pelayanan umum administrasi perkantoran, aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, aspek peningkatan kesejahteraan dan tertib administrasi pegawai, aspek penyelesaian masalah kepegawaian, aspek kualitas penempatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional, aspek penyediaan data kepegawaian yang akurat dan up to date. Hasil pengukuran indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN	PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016				CAPAIAN %
	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA	REALISASI	
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya operasional pelayanan administrasi perkantoran 1 tahun.				
1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	INPUT:				85,4
	Dana	Rupiah	187.700.000	160.376.629	85,4
	OUTPUT				100
	Terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantot : Belanja Jasa Kantor: - Telpon	Bulan	12	12	100

	- Air - Listrik - Surat kabar - Internet - Publikasi - Dokumentasi & dekorasi Belanja Perawatan Kendaraan: - Bayar STNK kendaraan roda 2 dan roda 4				
	OUTCOME				100
	Penyediaan jasa perlengkapan dan peralatan kantor terpenuhi 1 tahun.	Bulan	12	12	100
2. Penyediaan bahan logistik kantor	INPUT:				91,5
	Dana		299.015.000	273.608.500	91,5
	OUTPUT				100
	Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor; - Belanja bahan pakai habis. - Belanja bahan/matrial - Belanja cetak dan penggandaan. - Belanja makan minum. - Belanja barang inventaris	Bulan	12	12	100
	OUTCOME				100
	Tersedianya bahan logistik kantor	Bulan	12	12	100
3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	INPUT:				95,9
	Dana		157.125.000	150.694.835	95,9
	OUTPUT				100
	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas	Bulan	12	12	100
	OUTCOME				100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas	Bulan	12	12	100

4. Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan	INPUT:				100
	Dana		60.000.000	60.000.000	100
	OUTPUT				100
	Terpenuhinya penyediaan tenaga keamanan, pengemudi dan kebersihan	Bulan	12	12	100
	OUTCOME				100
	Terlaksananya penyediaan tenaga keamanan, pengemudi dan kebersihan	Bulan	12	12	100
5. Pengendalian dan penatausahaan keuangan daerah	INPUT:				95,9
	Dana		158.560.000	152.091.000	95,92
	OUTPUT				100
	Terlaksananya penhendalian dan penatausahaan keuangan daerah	Bulan	12	12	100
	OUTCOME				100
	Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian dan penatausahaan keuangan daerah	Bulan	12	12	100
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung operasional kantor				
1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	INPUT:				96,3
	Dana		150.00.000	144.435.000	96,29
	OUTPUT				100
	Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor :	Jenis	11	11	100

	Belanja modal peralatan dan mesin. - Pengadaan alat kantor - Pengadaan alat rumah tangga - Pengadaan komputer				
	OUTCOME				100
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	11	11	100
2. Pemeliharaan ruin / berkala gedung kantor	INPUT:				94,5
	Dana		45.000.000	42.534.300	94,52
	OUTPUT				100
	Terkalsananya pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor dalam 1 tahun	Bulan	12	12	100
	OUTCOME				100
	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dalam 1 tahun	Bulan	12	12	100
3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	INPUT:				98,5
	Dana		72.500.000	71.376.583	98,45
	OUTPUT				100
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	Bulan	12	12	100
	OUTCOME				100
	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	Bulan	12	12	100
4. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	INPUT:				71,42
	Dana		30.100.000	21.497.450	71,42
	OUTPUT				100

	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun	Bulan	12	12	100
	OUTCOME				100
	Terpemeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun	Bulan	12	12	100
III. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1. Bintek penyelesaian permasalahan kepegawaian	INPUT				97,6
	Dana	Rupiah	50.000.000	48.785.622	97,57
	OUTPUT				
	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas dalam menyelesaikan masalah kepegawaian pada unit kerja	Orang	172	172	100
	OUTCOME				100
	Petugas yang mampu menyelesaikan permasalahan kepegawaian di unit kerja.	Orang	172	172	100
III Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
1. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	INPUT				97
	Dana	Rupiah	135.000.000	131.360.308	97
	OUTPUT				99,4
	Peningkatan motivasi dan kinerja PNS dalam menjalankan tugas	Orang	164	163	99,4
	- Penghargaan PNS yang berprestasi di bidangnya		14	10	71,4
	- Penghargaan Satyalancana karya satya		150	153	102
	OUTCOME				99,9
	Tercapainya prestasi kerja PNS dengan 2 kegiatan	Orang	164	163	99,9
2. Akurasi data CPNS dan PNS	INPUT				99,67
	Dana	Rupiah	60.396.000	60.199.367	99,67
	OUTPUT				100
	Terlaksananya akurasi	Kegiatan	5	5	100

	data dengan kegiatan: - Entri up date data. - Pemrosesan SK konversi NIP - Pemrosesan KPE. - Pemrosesan Karpeg, Karis-Karsu - Informasi kepegawaian profil & DUK	Pegawai SK	15.500 10	13.656 13	88,1 130
		Kartu Pegawai	100 500	135 1.166	135 233
		buku	16	16	100
	OUTCOME				88,1
	Tersedianya data pegawai.	Pegawai	15.500	13.656	88,1
3. Pemrosesan jabatan struktural dan jabatan fungsional	INPUT				90,52
	Dana	Rupiah	370.000.000	334.934.659	90,52
	OUTPUT				163
	Terisinya jabatan fungsional dan struktural	Orang	1.600	1.841	115
	- Jabatan Fungsional	Orang	1000	602	60
	- Jabatan struktural	Orang	600	1.239	270
	- Uji kopetensi	Orang	655	626	95,6
	OUTCOME				109
	Meningkatkan kualitas penempatan PNS dalam jabatan struktural	Orang	2.255	2.467	109
4. Pembinaan dan penyelesaian masalah PNS	INPUT				98
	Dana	Rupiah	150.000.000	149.840.558	99,9
	OUTPUT				100
	- Pembinaan di unit kerja.	Unit kerja	27	57	211
	- Pemrosesan usulan Bapertarum.	Orang	59	39	66,1
	- Fasilitas LHKPN	Kegiatan	4	4	100
	- Keputusan pemberian ijin/keterangan untuk melakukan perceraian	kasus	30	48	160
	- SK penjatuhan hukuman disiplin.	Kasus	30	31	103
	- Keputusan permintaan ijin beristri lebih dari satu.	kasus	0	0	0
	- Sidak.	Kegiatan	2	2	100
	OUTCOME	Orang			100
	Terselesaikannya permasalahan kepegawaian	kegiatan	7	7	100
5. Pemrosesan pensiun dan penataan PNS	INPUT				88,8
	Dana	Rupiah	103.000.000	91.459.738	88,8
	OUTPUT				100
	Pemrosesan :				

	- Pensiun - Penataan / mutasi PNS	Orang Orang	400 200	474 5713	119 2857
	OUTPUT				100
	Fasilitasi kenaikan pangkat pengabdian dan pengurusan pensiun tepat waktu serta penataan /mutasi PNS	Orang	600	6187	1031
6. Pemrosesan kenaikan pangkat PNSD	INPUT				90,75
	Dana	Rupiah	122.000.000	110.709.61	90,75
	OUTPUT				91
	Pemrosesan SK		2.010	1.833	91
	- KP	Orang	2.000	1.828	91,4
	- PMK	Orang	20	5	25
7. Pengelolaan administrasi PTT	OUTCOME				93,1
	Terbitnya petikan SK kenaikan pangkat PNS.	Orang	2.155	1.972	92
	Petikan SK peninjauan masa kerja golongan	Orang	20	5	25
	INPUT				85
	Dana	Rupiah	160.000.000	136.379.500	85
	OUTPUT				100
8. Pengelolaan arsip CPNS dan PNS	- Tertib administrasi PTT.	Orang/PTT	23	23	100
	OUTCOME				100
	- Inpassing honor PTT. - Pesangon BUP	Orang/PTT	23 8	23 8	100 100
	INPUT				78
	Dana	Rupiah	26.604.000	26.568.500	78
	OUTPUT				97
9. Pengembangan sumber daya aparatur	Penataan dan pemeliharaan arsip pegawai	Arsip/file	15.500	14.981	96,7
	OUTCOME				96,7
	Arsip PNS dan CPNS terpelihara dengan baik	Arsip/file	15.500	14.981	96,7
	INPUT				79,39
	Dana	Rupiah	995.000.000	758.134.608	79,39
	OUTPUT				100
	Meningkatnya kualitas SDM aparatur melalui:	Kegiatan	5	5	100
	- Ijin belajar, ket belajar, ket pendidikan	orang	100	255	
	- Keterangan penggunaan gelar		200	190	
	- Tugas belajar		50	46	

	- Diklat dan sejenisnya - Ujian kedinasan (Ujian kenaikan tingkat I & II, UKPPI & uji kopetensi)		83 836	322 913	
	OUTCOME				100
	Meningkatkan kualitas SDA untuk pelayanan - Diklat dan sejenisnya - Ijin belajar, ket belajar, ket pendidikan - Keterangan penggunaan gelar - Tugas belajar - Ujian kedinasan	Orang	1269 83 100 200 50 836	1726 322 255 190 46 913	136
10.Penyusunan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional non guru dan non bidang kesehatan	INPUT				77
	Dana	Rupiah	88.000.000	67.639.118	76,8
	OUTPUT				113
	Penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu	Kegiatan	23	26	113
	OUTCOME				113
	Penetapan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional non guru dan non bidang kesehatan	kegiatan	23	26	113
11.Penyusunan formasi dan pengadaan pegawai	INPUT				79
	Dana	Rupiah	250.000.000	197.675.147	79
	OUTPUT				100
	- Penyusunan formasi di unit kerja.	Unit kerja	259	259	100
	- Fasilitasi seleksi Capara IPDN	orang	0	0	0
	- Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan sumpah janji PNS	Orang	575	575	100
	- Pengambilan sumpah janji PNS yang belum disumpah	Orang	125	125	100
	- Seleksi penerimaan CPNS dari Bidang PTT dan tenaga harian lepas tenaga harian pembantu penyuluh pertanian	Orang	341	0	0
	- Pembuatan aplikasi e-formasi	Paket/aplikasi	1	1	100
	OUTCOME				80
	Terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi.	Kegiatan	5	4	80

12. Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas	INPUT				88
	Dana	Rupiah	50.000.000	44.225000	88
	OUTPUT				100
	Pembekalan mental dan ketrampilan bagi PNS yang akan purna tugas	Orang	120	120	100
	OUTCOME				100
	PNS akan lebih siap mental untuk menghadapi purna tugas	Orang	120	120	100
umlah APBD untuk program/kegiatan TA 2016			3.680.000.000.	3.207.750.328.	87,17

Adapun hasil pengukuran diatas maka dapat direkapitulasi capaian kinerja yang hanya terbatas pada pemantauan atau pengukuran indikator kegiatan input, output saja tapi melihat outcome dan di hitung secara keseluruhan pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran sebagai berikut:

REKAPITULASI CAPAIAN AKHIR RIALISASI KEGIATAN TAHUN 2016

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLAL REALISASI INDIKATOR (%)		KETERANGAN
Program pelayanan administrasi perkantoraan		97,8		
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Input	85	
		Output	100	
		Outcame	100	
	Capaian		95	Sangat baik
2	Penyediaan bahan logistik	Input	92	
		Output	100	
		Outcame	100	
	Capaian		97,3	Sangat baik
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Input	96	
		Output	100	
		Outcame	100	
	Capaian		98,6	Sangat baik
4	Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan	Input	100	
		Output	100	
		Outcame	100	
	Capaian		100	Sangat baik
5	Pengendalian dan penatausahaan keuangan daerah	Input	96	
		Output	100	
		Outcame	100	
	Capaian		98,6	Sangat baik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		95,1		Sangat baik
1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input	96	

		Output	91	
		Outcame	91	
	Capaian		92,6	Sangat baik
2	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Input	95	
		Output	100	
		Outcame	100	
	Capaian		98,3	Sangat baik
3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Input	98,5	
		Output	100	
		Outcame	100	
	Capaian		99,3	Sangat baik
4	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input	71,4	
		Output	100	
		Outcame	100	
	Capaian		90,3	Cukup baik
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			99,2	
1	Bintek Penyelesaian masalah kepegawaian	Input	97,6	
		Output	100	
		Outcame	100	
	Capaian		99,2	Sangat baik
Program pembinaan dan pengembangan aparatur			93,9	
1	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Input	97,3	
		Output	99,4	
		Outcame	99	
	Capaian		98,6	Sangat baik
2	Akurasi data CPNS dan PNS	Input	99,7	
		Output	100	
		Outcame	88,1	
	Capaian		95,9	Sangat baik
3	Pemprosesan jabatan struktural dan jabatan fungsional	Input	90,5	
		Output	100	
		Outcame	100	
	Capaian		96,8	Sangat baik
4	Pembinaan dan penyelesaian masalah PNS	Input	99,9	
		Output	100	
		Outcame	100	
	Capaian		99,9	Sangat baik
5	Pemprosesan pensiun dan penataan PNSD	Input	88,8	
		Output	100	
		Outcame	100	
	Capaian		96,3	Sangat baik
6	Pemprosesan Kenaikan Pangkat PNSD	Input	90,8	
		Output	91	
		Outcame	91	
	Capaian		90,9	Sangat baik
7	Pengelolaan administrasi PTT	Input	85,3	
		Output	100	
		Outcame	100	
	Capaian		95,1	Sangat baaik

8	Pengelolaan arsip CPNS dan PNS	Input	78	
		Output	96,7	
		Outcame	96,7	
	Capaian		90,6	Sangat baik
9	Pengembangan sumber daya aparatur	Input	79,7	
		Output	100	
		Outcame	100	
	Capaian		93,2	Sangat baik
10	Penyusunan, penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional non guru dan non bidang kesehatan.	Input	70	
		Output	100	
		Outcame	100	
	Capaian		90	Cukup baik
11	Penyusunan formasi dan pengadaan pegawai	Input	79	
		Output	100	
		Outcame	80	
	Capaian		83,3	Cukup Baik
12	Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas	Input	88	
		Output	100	
		Outcame	100	
	Capaian		96	Sangat baik
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		96,5	Sangat Baik

Penghitungan capaian kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas pada Tahun 2016 dari 4 **program** dengan 22 **kegiatan** dapat dikategorikan **Sangat Baik** dengan secor nilai **96,5**.

CAPAIAN TARGET KINERJA BERDASARKAN PEMBANDINGAN DENGAN RKPD 2016.

Capain kinerja berdasarkan RKPD Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan urusan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, dan untuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas Indikator dan targer capaian kinerja kegiata .sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA / KONDISI	TAHUN 2016	
		TARGET (%)	REALISASI (%)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan melalui kegiatan :	12 bulan / 1 tahun	12 bulan / 1 tahun
	Terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun.	12 bulan	12 bulan
	Terpenuhinya penyediaan logistik kantor dalam 1 tahun	12 bulan	12 bulan
	Tersedianya tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan kantor.	12 bulan	12 bulan
	Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi.	12 bulan	12 bulan
	Terlaksananya pengendalian dan penatausahaan keuangan dengan jasa	12 bulan	12 bulan

	administrasi keuangan		
2	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dengan penyediaan :	12 bulan	12 bulan
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	11 jenis	10 jenis
	Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas dalam 1 tahun	12 bulan	12 bulan
	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan
	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun	12 bulan	12 bulan
3	Meningkatkan kemampuan petugas dalam menyelesaikan permasalahan kepegawaian pada unit kerja.	130 orang	172 orang
4	Peningkatan motivasi dan kinerja PNS dalam melaksanakan tugas dengan: a. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi di bidang tugasnya. b. Pemberian penghargaan Satya lancana karya satya.	2 kegiatan 14 orang 150 orang	2 kegiatan 10 orang 153 orang
5	Tersedianya data kepegawaian yang akurat dan up to date melalui : a. Entry dan update data pegawai. b. Pemrosesan usulan perbaikan SK konversi NIP. c. Pemrosesan perbaikan KPE. d. Pemrosesan Karpeg, Karis-Karsu,	4 Kegiatan 15.500 orang 10 SK. 100 KPE. 500 orang	4 kegiatan 13.656 orang 13 SK 135 KPE 1.166 orang
6	Terisinya jabatan sesuai dengan kekosongan jabatan melalui mutasi dan promosi jabatan struktural, pengisian Kepala Sekolah dan jabatan fungsional. - Jabatan fungsional - Jabatan struktural	2100 orang 1000 orang 1200 orang	1720 orang 983 orang 1625 orang
7	Meningkatkan pemahaman PNS tentang hak dan kewajiban serta pelaksanaan penyelesaian masalah PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui : a. Pembinaan di unit kerja. b. Fasilitasi permohonan Bapertarum. c. Fasilitasi LHKPN d. Keputusan pemberian ijin / keterangan untuk melakukan perceraian. e. SK penjatuhan hukuman disiplin. f. Keputusan permintaan beristri lebih dari satu orang. g. Sidak	12 kegiatan 27 unit kerja 59 orang 4 kegiatan 30 SK. 30 SK. 0 SK. 2 kegiatan.	6 kegiatan 57 unit kerja 39 orang. 4 kegiatan 38 SK 31 SK 0 2 kegiatan.
8	Terlaksananya pemrosesan kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun tepat waktu serta pemrosesan mutasi/penataan PNS. Pemrosesan pensiun.	750 orang 400 orang. 350 orang.	6.189 orang 476 orang 5.713 orang

	Pemrosesan mutasi/penataan PNS		
9	Terlaksananya pemrosesan kenaikan pangkat (KP) dan PMK (peninjauan masa kerja golongan) yang tepat waktu.	3050 KP 3.000 orang PMK 50 orang	Usulan KP 1.828 orang Usulan PMK 5 orang
10	Meningkatnya tertib administrasi PTT	47 orang	23 orang
11.	Meningkatnya tertib pengelolaan arsip CPNS dan PNS.	15.500 orang	14.981 orang/file
12.	Meningkatnya kualitas SDA aparatur : Dengan peningkatan kualitas SDA untuk a. Diklat dan sejenisnya b. Tugas Belajar. c. Ijin Belajar, keterangan belajar, ket. pendidikan. d. Keterangan penggunaan gelar e. Ujian kedinasan (UKPPI, Kenaikan Tk.I/ Tk.II dan uji kopetensi pegawai).	5 kegiatan 775 orang 83 orang 50 orang 100 orang 200 orang 836 orang	5 kegiatan 1.167 orang 322 orang 46 orang 255 orang 190 orang 913 orang
13.	Meningkatkan pelayanan penilaian dan penetapan angka kredit untuk jabatan fungsional non guru dan non bidang kesehatan.	15 kegiatan.	23 kegiatan
14.	Tersusun dan terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi melalui: a. Penyusunan formasi. b. Fasilitasi penerimaan Capra IPDN. c. Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Simpah Janji PNS.. d. Pengambilan sumpah janji PNS yang belum disumpah. e. Seleksi penerimaan CPNS dari Bidan PTT dan tenaga harian lepas tenaga harian pembantu penyuluh pertanian. f. Pembuatan aplikasi E-Formasi Pegawai	4 kegiatan 259 unit kerja 0 orang 575 orang 125 orang 341 orang 0 aplikasi	4 kegiatan 259 unit kerja 0 orang 575 orang 125 orang 0 orang 1 aplikasi
15.	Pemberian pembekalan bagi PNS yang akan memasuki purna tugas.	500 orang	120 orang

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PEMBANDINGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA 2016.

Sedangkan gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kepegawaian direpresentasikan berdasarkan capaian *Perjanjin kinerja*, adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4
Pemenuhan kebutuhan	- Terpenuhinya penyediaan jasa	12 bulan	12 bulan

pelayanan administrasi dan sarana prasarana kantor.	peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun. - Terpenuhiya penyediaan logistik kantor dalam 1 tahun. - Tersedianya tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan kantor. - Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi. - Terlaksananya pengendalian dan penatausahaan keuangan dengan jasa administrasi keuangan. - Terselenggaranya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. - Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor. - Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. - Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.		
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dibidang konseptual, teknis dan fungsional	Meningkatnya kualitas SDA aparatur melalui Diklat, Tugas Belajar, Ijin Belajar, Ujian Dinas Tingkat I dan II, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah dan PNS yang dapat dioptimalkan dalam formasi-formasi yang lebih strategis.	Peningkatan kualitas SDM aparatur 506 orang melalui kegiatan : - Pengajua PNS ijin belajar, keterangan belajar dan keterangan pendidikan 100 orang. - Pengajuan PNS penggunaan gelar 100 orang - PNS yang mengikuti seleksi tugas belajar dan PNS tugas belajar 56 orang. - Diklat dan sejenisnya 150 orang. - Ujian kedinasan	- 255 org - 190 org - 46 org - 322 org - 913 org

		100 orang.	
	Terlaksananya penghitungan formasi dan pelaksanaan pengadaan pegawai.	Dengan kegiatan : 5 - Penyusunan formasi PNS sebanyak 259 unit kerja. - Seleksi penerimaan CPNS 890 orang. - Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan sumpah janji PNS 575 orang - Sumpah janji PNS bagi PNS yang belum di sumpah 125 orang.	4 kegiatan 259 unit kerja 0 575 orang 125 orang
Meningkatkan kesejahteraan dan tertib administrasi pegawai	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS untuk peningkatan prestasi dan peningkatan kinerja pelayanan.	- Penghargaan PNS yang berprestasi 15 orang - Penghargaan Satya Lancana karya satya 150 orang.	10 orang 153 orang
	Terfasilitasinya kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun tepat waktu serta penataan/mutasi PNS.	Pemrosesan kenaikan pangkat pengabdian, pensiun tepat waktu dan pemrosesan mutasi/penataan PNS 600 terdiri dari : - Pensiun 400 orang. - Mutasi 200 orang	476 orang 5.713 orang
	Terbitnya petikan SK kenaikan pangkat PNS dan petikan SK peninjauan masa kerja golongan.	- Kenaikan pangkat 3.000 orang - Peninjauan masa kerja golongan 20 orang	1.828 orang 5 orang
	Terfasilitasinya penilaian penetapan angka kredit PNS	22 kegiatan	26 kegiatan
	Tertibnya pengelolaan administrasi PTT	Pengelolaan administrasi PTT	

		28 orang. Melalui : - Pemberian pesangon pemberhentian PTT yang memasuki BUP 5 orang. - Terbitnya SK inpassing / penyesuaian honor PTT tahun 2016, 23 PTT.	8 PTT 23 PTT
	Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas	Pemberian pembekalan mental sepiritual bagi PNS yang akan purna tugas 120 orang.	120 orang
Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian masalah kepegawaian.	Penyelesaian permasalahan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	- Pelaksanaan pembinaan di unit kerja 27 kegiatan. - Pemrosesan usulan permohonan. Bapertarum 59 orang. - Fasilitas LHKPN 4 kegiatan. - Keputusan pemberian ijin untuk melakukan perceraian 30 kasua/SK. - keterangan untuk melakukan perceraian 30 kasus - SK penjatuhan hukuman disiplin 30 kasus/SK. - Keputusan permintaan ijin beristeri lebih dari satu. 3 kasus. - Sidak 0 kegiatan	- 57 kegiatan - 39 orang - 4 kegiatan - Keputusan pemberian ijin dan keterangan untuk melakukan perceraian 38 kasus/SK. - 31 kasus - 0 - Sidak 2 kegiatan
Meningkatkan kualitas penempatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional.	Penempatan pegawai sesuai kompetensinya dengan pengisian jabatan sesuai formasi, berdasarkan pada pembinaan sistim karir yang terbuka.	Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional 1.600 orang terdiri dari : - Pengisian jabatan struktural 400 orang. - Penataan	1.239 orang. 626 orang.

		jabatan fungsional 1.200 orang. - Uji kompetensi 0	Uji kompetensi 695
Tersedianya data kepegawaian yang akurat dan up to date	Tersedianya data PNS dan CPNS.	4 kegiatan terdiri : - Entri up date data 15.000 pegawai. - Permohonan pemrosesan Konversi NIP. 2 SK - Fasilitasi/pemrosesan pembuatan KPE 100 kartu - Fasilitasi/pemrosesan Karpeg, Karis-Karsu 500 pegawai. - Informasi kepegawaian / profil 0	13.656 PNS. 13 SK 135 KPE 1.166 Karis-Karsu & Karpeg. 16 buku
	Tertata dan terpeliharanya arsip/file kepegawaian.	15.000 orang/arsip	14.981 file/arsip

Hasil capaian sasaran dan capaian indikator kegiatan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan visi misi BKD dengan capaian **Indikator Kinerja Utama** (IKU) dapat dilihat sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Kategori
1.	Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bermoral, kompetitif dan professional menuju terciptanya prinsip-prinsip <i>good governance</i>	1. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia aparatur dibidang konseptual, teknis dan fungsional	1. Meningkatnya pemahaman petugas dalam menyelesaikan permasalahan kepegawaian	99	Sangat Baik
			2. Terlaksananya Pengembangan sumber daya aparatur melalui Diklat, tugas belajar, ijin belajar, ket. belajar, ket. pendidikan, ujian kedinasan kenaikan tingkat I dan II serta ujian	93	Sangat Baik

			kenaikan pangkat penyesuaian ijasah.		
.			3. Terlaksananya Penyusunan formasi dan pengadaan pegawai.	83	Cukup baik
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN ke.1				91,7	Sangat baik
		6. Meningkatkan kesejahteraan dan tertib administrasi pegawai;	1. Pembelakalan PNS yang akan memasuki purna tugas	96	Sangat baik
			2. Terbitnya petikan SK kenaikan pangkat dan SK peninjauan masa kerja golongan PNS	91	Cukup baik
			3. Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun tepat waktu dan fasilitasi mutasi PNS	96	Sangat baik
			4. Terfasilitasi penilaian penetapan angka kredit jabatan fungsional (non guru dan Non bidang kesehatan)	90	Cukup baik
			5. Terwujudnya tertib administrasi PTT	95	Sangat baik
			6. Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	99	Sangat baik
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN ke.2				94,5	Sangat baik
		7. Meningkatkan Kualitas Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional;	1. Pengisian jabatan melalui pengangkatan/pe mberhentiaan PNS dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan formasi dengan pengukuran	97	Sangat baik

			kompetensi PNS		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN ke.3				97	Sangat Baik
		8. terselesaikan - nya masalah kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penyelesaian permasalahan kepegawaian dengan adanya: - Pembinaan PNS pada unit kerja. - Fasilitasi pemrosesan Taperum, - Fasilitasi LHKPN. - Pemrosesan pemeberian ijin / keterangan untuk melakukan perceraian. - Pemrosesan penjatuhan hukuman disiplin. - Melakukan sidak pada jam kerja.	99	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN ke.4				99	Sangat baik
		9. Adanya data kepegawaian yang akurat dan up to date;	1. Tersedianya data PNS dan CPNS yang akurat dan up to date melalui aplikasi SIMPEG (file/data pegawai)	96	Sangat baik
			2. Penataan dan pemeliharaan arsip PNS dan CPNS.	91	Sangat baik
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN ke.5				93,5	Sangat baik
		10. Terlaksananya pengembangan aplikasi program SIMPEG	Catatan: sasaran ke 6 yang ada di Renstra untuk tahun 2016 untuk pengembangan informasi kepegawaian belum ada kegiatan pengembangan aplikasi.	-	-
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN ke.6				-	-

PENGUKURAN KINERJA PADA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 DENGAN PEMBANDINGAN TAHUN 2015

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian %	Kenaikan / Penurunan
			2016	2015		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan (100%) a. Pemenuhan penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor. b. Pemenuhan penyediaan logistik kantor. c. Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan kantor. d. Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. e. Terlaksananya pengendalian dan penatausahaan keuangan daerah.	12 bulan (100%)	12 bulan (99,9%)	12 bulan (99,5%)	99,9	0,005
	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur selama 12 bulan. a. Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. b. Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor. c. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. d. Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan (100%)	12 bulan (99,7%)	12 bulan (99,5)	99,7	0,002
2.	Meningkatkan kemampuan petugas dalam menyelesaikan permasalahan kepegawaian pada unit kerja.	172 orang	172 orang	79 orang	100	0,54
3	Peningkatan motivasi dan kinerja PNS dalam melaksanakan tugas dengan: a. Pemberian penghargaan bagi PNS yang	164 orang 14 orang	163 10 orang	151 orang 12 orang	99,4 71,4	0,073 (-0,14)

	berprestasi di bidang tugasnya. b. Pemberian penghargaan Satyalancana karya satya.	150 orang	153 orang	139 orang	102	0,093
4	Tersedianya data kepegawaian yang akurat dan up to date melalui : a. Entry dan update data pegawai. b. Penyusunan informasi kepegawaian (DUK dan profil pegawai) c. Pemrosesan usulan perbaikan SK konversi NIP. d. Pemrosesan perbaikan KPE. e. Pemrosesan Karpeg, Karis-Karsu. f. Pendataan E-PUPNS 2015	5 kegiatan 15.500 orang 16 buku 10 SK. 100 KPE. 500 orang 0	5 kegiatan 13.656 orang 16 buku 13 SK 135 KPE 1.166 orang 0	6 kegiatan 15.428 orang 31 buku 0 87 KPE 421 orang 15.428 PNS/org	100 88,1 100 130 135 233 -	(-0,2) (-0,11) (-0,94) (1,3) 0,48 74,5 -
5	Terisinya jabatan sesuai dengan kekosongan jabatan melalui mutasi dan promosi jabatan struktural, jabtan fungsional dan pengisian Kepala Sekolah. - Jabatan struktural - Jabatan fungsional Uji kompetensi	1.600 orang 600 orang 1000 orang 655 orang	1.841orang 1.239 orang 602 orang 626 orang	1.720 orang 209 orang 1.511 orang 0	115 207 60,2 95,6	0,76 1,72 (-0,91) 0,96
.6	Meningkatnya pemahaman PNS tentang hak dan kewajiban serta pelaksanaan penyelesaian masalah PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui : a. Pembinaan di unit kerja. b. Fasilitasi permohonan Bapertarum. c. Fasilitasi LHKPN d. Keputusan pemberian ijin/keterangan untuk melakukan perceraian. e. SK penjatuan hukuman disiplin. f. Keputusan permintaan beristri lebih dari 1 orang. g. Sidak	6 kegiatan 27 kegiatan (@ 50 orang) 59 orang 4 kegiatan (22 org) 30 SK. 30 SK. 0 SK. 2 kegiatan.	6 kegiatan 57 kegiatan 39 orang 4 kegiatan (18) 48 SK 31 SK 0 2 kegiatan	7 kegiatan 27 kegiatan (1.350 orang) 90 orang 4 kegiatan (21 org) 45 SK 21 SK 0 3 kegiatan	100 211 66,1 100 160 103 SK 0 100	(-0,16) 1,11 (-0,86) (-0,14) (-0,13) 0,3 0 (-0,5)

7	Meningkatnya proses kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun tepat waktu serta pemrosesan mutasi/penataan PNS. a. Pemrosesan pensiun. b. Pemrosesan mutasi/penataan PNS.	400 orang. 200 orang.	476 orang 5713 orang	322 orang 361 orang	119 2713	0,39 26,7
8.	Meningkatnya proses kenaikan pangkat (KP) dan PMK (peninjauan masa kerja golongan) yang tepat waktu.	KP 2.000 orang PMK 20 orang	1828 orang 5 orang	1.995 orang 45 orang.	91,4 25	(-0,084) (-2)
9.	Meningkatnya tertib administrasi PTT	23 orang	23 orang	47 orang	100	(-1,04)
10.	Meningkatnya tertib pengelolaan arsip CPNS dan PNS.	15.500 orang	14.981 orang	15.428 orang	96,7	(-0,03)
11.	Meningkatnya kualitas SDA aparatur melalui : a. Diklat dan sejenisnya b. Tugas Belajar. c. Ijin Belajar, keterangan belajar, ket. pendidikan. d. Keterangan penggunaan gelar e. Ujian kedinasan (UKPPI & Kenaikan Tk.I dan Tk.II).	1.269 orang 83 orang 50 orang 100 orang 200 orang 836 orang	3.216 orang 322 orang 46 orang 255 orang 190 orang 913 orang	1.167 orang 388 orang 59 orang 340 orang 215 orang 165 orang	253 388 92 255 95 109	1,61 (-0,78) (-0,2) (-0,85) (-0,13) 0,89
12.	Meningkatnya pelayanan penilaian dan penetapan angka kredit untuk jabatan fungsional non guru dan non bidang kesehatan.	23 kegiatan.	26 kegiatan	16 kegiatan	113	(0,43)
13.	Tersusun dan terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi melalui: a. Penyusunan formasi. b. Nota persetujuan NIP CPNS dan SK CPNS dari pelamar umum formasi 2014. c. Nota persetujuan NIP CPNS dan SK CPNS dari tenaga honorer K.II formasi 2013. d. Nota persetujuan NIP CPNS dan SK	5 kegiatan 259 unit kerja 0 orang 0 orang 0 orang	4 kegiatan 259 unit kerja 0 0 0	4 kegiatan 259 unit kerja 46 orang 519 orang 10 orang	80 100 0 0 0	0 0 0 0 0

	CPNS formasi dokter alokasi khusus 2014. <u>Target tahun 2016</u> e. Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Sumpah Janji PNS. f. Pengambilan sumpah janji PNS yang belum diambil sumpah. g. Seleksi penerimaan CPNS dari Bidan PTT dan tenaga harian lepas tenaga harian pembantu penyuluh pertanian. h. Pembuatan aplikasi E-Formasi Pegawai.	575 orang 125 orang 341 orang 1 aplikasi	575 orang 125 orang 0 1 aplikasi	0 0 0 0	100 100 0 100	1 1 0 1
14	Pemberian pembekalan bagi PNS yang akan memasuki purna tugas.	120 orang	120 orang	111 orang	100	0,075

B. ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja kegiatan bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam dokumen RENSTRA, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan penetapan target tahun berjalan dan target akhir dalam RENSTRA, perbandingan dengan realisasi tahun lalu serta analisis atas perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas pada tahun 2016, maka dari 3 misi tersebut adalah yaitu :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah dan dengan cermat mengelola penggunaan sumber daya manusia tersebut;
2. Mengakui performa dan prestasi pada semua tingkatan dan menciptakan lingkungan kerja profesional yang memberikan jalan bagi pemenuhan diri serta pengembangan karier aparatur pemerintah daerah;
3. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian;

Dengan mewujudkan melalui pencapaian tujuan yaitu terwujudnya aparatur pemerintah Kabupaten Banyumas yang kompetitif, bermoral dan profesional menuju terciptanya prinsip-prinsip good governance.dengan 6 (enam) sasaran yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia aparatur;
2. Meningkatkan kesejahteraan dan tertib administrasi pegawai;
3. Meningkatkan kualitas penempatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional;
4. terselesaikannya masalah kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Tersedianya data kepegawaian yang akurat dan up to date;
6. Terlaksananya aplikasi program SIMPEG.

Dari 6 (enam) sasaran diwujudkan dengan 4 program, dengan capaian kinerja program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian rata-rata 97,8% dengan 5 (lima) kegiatan.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan capaian rata-rata 95,1% dengan 4 (empat) kegiatan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan capaian rata-rata 93% dengan 1 kegiatan.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan capaian rata-rata 90,7% dengan 12 kegiatan.

Gambaran capaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja pada penetapan kinerja / perjanjian kinerja yaitu dengan analisis hasil capaian yang ada pada tabel tersebut diatas maka sampai tahun 2016 capaian kinerja sasaran dari 6 (enam) sasaran kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur rata-rata dengan capaian 91,7 % (sangat baik) capaian tersebut diukur dari 3 (tiga) capaian indikator dan indikator yang melebihi target adalah indikator pengembangan sumber daya aparatur dengan total capaian kinerja sampai 136 % yang di pengaruhi dari sub kegiatan fasilitasi Diklat dan sejenisnya dengan pengiriman Diklat dari target 83 orang terealisasi 322 orang, fasilitasi ijin belajar, keterangan belajar dan keterangan pendidikan dari target 100 orang terealisasi 255 orang, fasilitasi Ujian kedinasan dengan target 836 orang terealisasi 913 orang yaitu untuk ujian dinas kenaikan tingkat I dan tingkat II 159 orang, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah (UKPPI) 59 orang dan untuk uji kompetensi 695 orang dari 728 pegawai.
2. Capaian kinerja sasaran peningkatan kesejahteraan dan tertib administrasi pegawai rata-rata dengan capaian 94,5% (sangat baik) capaian tersebut diukur dari 6 (enam) capaian indikator kinerja tersebut, rata-rata sangat baik, dan dari 6 indikator 4 indikator dengan capaian rata-rata sangat baik yaitu Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 99%, Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas 96%, Terwujudnya tertib administrasi pegawai tidak tetap (PTT) 95%, dan Kenaikan pangkat pengabdian dan terbitnya SK pensiun tepat waktu serta fasilitasi mutasi/penataan PNS 96 % sedangkan untuk penataan pegawai atau mutasi internal pada tahun 2016 dari target mutasi 200 orang terealisasi sampai 5.713 pegawai, untuk ditata sesuai kebutuhan OPD karena adanya struktur kelembagaan baru mendasari *Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyumas* Sedangkan dan 2 indikator capaian kinerja rata-rata cukup baik yaitu Penerbitan petikan SK kenaikan pangkat dan SK peninjauan masa kerja golongan 91% dan Fasilitasi penilaian penetapan angka kredit jabatan fungsional non guru dan non bidang kesehatan 90% .
3. Capaian kinerja sasaran peningkatan kualitas penempatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional dengan capaian kinerja rata-rata 97% (sangat baik) dan untuk pengisian jabatan struktural dalam capaian kegiatan pemrosesan, pengangkatan / pemberhentian jabatan PNS dalam jabatan ada kenaikan yang

cukup besar dari target 600 orang terealisasi menjadi 1.239 orang karena adanya pengisian jabatan pada OPD baru, untuk proses pengisian jabatan tinggi pratama harus melalui mekanisme seleksi terbuka dan untuk jabatan administrasi terlebih dulu harus ada uji kompetensi sebagai peta data dalam pengisiannya baik untuk promosi maupun mutasi jabatan. kemudian untuk penataan / pengisian jabatan fungsional langsung diproses sepanjang PNS yang mengajukan sudah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan fungsional.

4. Capaian kinerja sasaran penyelesaian permasalahan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan capaian kinerja rata-rata 99% (Sangat baik) dengan 6 (enam) indikator capaian kinerja tersebut rata-rata telah memenuhi target dan masih ada indikator yang harus menjadi perhatian serius yaitu terkait dengan pemberian ijin dan keterangan untuk melakukan perceraian yang mengalami kenaikan dari target 30 orang/ kasus menjadi 38 orang/kasus dan hukuman disiplin dari target 30 kasus menjadi 31 kasus maka harus ditingkatkan pembinaan maupun pengawasannya terhadap aparatur sipil negara terhadap kedisiplinannya sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
5. Capaian kinerja data kepegawaian yang akurat dan up to date dengan capaian kinerja rata-rata 93,5 (Sangat baik), dengan 2 (dua) indikator capaian kinerja tersebut telah memenuhi target dengan dukungan sub kegiatan fasilitasi KPE, fasilitasi Karpeg, Karis-Karsu dan informasi kepegawaian (profil kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan).
6. Sedangkan capaian kinerja sasaran penembangan aplikasi program SIMPEG untuk tahun 2016 belum ada pengembangan SIMPEG, dan aplikasi SIMPEG akan dikembangkan pada tahun anggaran 2017.

Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan yang mengarah pada sasaran untuk mewujudkan RPJM 2013 – 2018 yaitu dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur melalui arah kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD teknis . Capaian target RPJM di tahun 2016 digambarkan sebagai berikut:

CAPAIAN RPJMD TAHUN 2013-2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s/d Tahun 2018	Capaian Kinerja RKPD 2014		Capaian Kinerja RKPD 2015		Capaian Kinerja RKPD 2016	
				Target 2014	Capaian 2014	Target 2015	Capaian 2015	Target 2016	Capaian 2016
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Jumlah Pegawai PEMDA yang mengikuti Diklat.	520	520	611	520	983	520	322
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2. Jumlah Pegawai PEMDA yang lulus Diklat	520	520	611	520	983	520	321
		3. Rasio pejabat struktural yang mengikuti Diklat PIM	119	96	1,010	80	0,75	93	0,82
		4. Prosentase PNS lulus S1	70	70	59,09	70	60,31	70	60
		5. Jumlah Pegawai	1.600	15.700	15.178	15.300	15.428	15.000	13.656

Keterangan :

- Jumlah Pegawai 13.656 orang
- Jumlah PNS yang lulus S1 8.180 orang
- Jumlah jabatan struktural 1.033.

Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah
Belum Diklat PIM	12	40	119	171
Sudah Diklat PIM	17	125	617	759
Jumlah	29	165	736	930

Catatan penjelasan dengan belum tercapainya indikator kinerja pada evaluasi RPJMD 2013-2018 tahun 2016 untuk *jumlah pegawai dari target 15.000* sampai bulan 31 Desember 2015 sejumlah 13.656 pegawai hal tersebut karena ada moratorium pegawai dan pengalihan setatus pegawai dari pemerintah daerah kabupaten ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat atau sebaliknya dari provinsi ke kabupaten, Dan untuk PNS yang yang berpendidikan S1 untuk target kinerja 70% sampai 2018 capaian tahun 2016 sebesar 60 % dari jumlah keseluruhan PNS yang ada.

Ada pun perbandingan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 dengan tahun 2015 dengan tabel diatas untuk capaian kinerja indikator sasaran yang ada dapat dilihat sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan 5 kegiatan selama 12 bulan mengalami kenaikan kinerja 0,005% dan ada efisiensi pada penyediaan logistik kantor untuk belanja BBM operasional, rekening listrik, internet dan jasa publikasi. serta efisiensi pada pengendalian dan penatausahaan daerah digunakan sesuai kebutuhan.
2. dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur selama 12 bulan mengalami kenaikan 0,002% ada efisiensi di belanja pemeliharaan aset tetap, peraalatan dan mesin karena masih dalam kondisi yang relatif baik.
3. Peningkatan kemampuan petugas dalam menyelesaikan permasalahan kepegawaian pada unit kerja mengalami kenaikan 0,54%, hal tersebut untuk melakukan bimbingan terhadap penyelesaian permasalahan kepegawaian terkait dengan penyusunan standar teknis kegiatan SKP, penyusunan E-Kinerja serta penanganan dan penyelesaian permasalahan kepegawaian yang ada di unit kerja.
4. Peningkatan motivasi dan kinerja PNS dalam melaksanakan tugas dengan: Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi di bidang tugasnya dan Pemberian penghargaan Satyalancana karya satya mengalami kenaikan 0,073 % untuk usulan Satyalancana Karya Satya dari Pemerintah Kabupaten Banyumas yang difasilitasi Pemerintah Provinsi ke (Sesmil Pres) Sekretaris Militer Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri RI melebihi target yang diusulkan dari 150 orang menjadi 153 orang dibandingkan tahun 2015 terealisasi 139 orang sedangkan pemberian penghargaan PNS yang berprestasi sesuai dengan bidang tugasnya mengalami penurunan dari target 14 orang terealisasi menjadi 10 orang.
5. Tersedianya data kepegawaian yang akurat dan up to date mengalami penurunan 0,02%. Dibandingkan dengan kegiatan pada tahun 2015 dengan 6 kegiatan yaitu adanya kegiatan E-PUPNS 2015 sedangkan pada tahun 2016 hanya memfasilitasi 5 kegiatan dalam penyediaan data kepegawain.
6. Terisinya jabatan sesuai dengan kekosongan jabatan melalui mutasi dan promosi jabatan struktural, pengisian Kepala Sekolah, dan penataan jabatan fungsional secara umum mengalami kenaikan 0,76%, pengisian jabatan struktural mengalami kenaikan 1,72% hal tersebut terkait dengan pengisian jabatan struktural karena adanya OPD baru mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan untuk tahun 2015 pengisian Jabatan Tinggi Pratama mulai menggunakan seleksi terbuka melalui panitia seleksi (PANSEL) dan tes kompetensi/assesment di Pusbang ASN dan pengisian jabatan administrasi melalui Baperjakat dengan terlebih dulu melakukan uji kompetensi, sedangkan untuk penataan/pengisian jabatan fungsional

mengalami penurunan 0,91 dari target 1000 orang terealisasi 602 orang pejabat fungsional.

7. Meningkatnya pemahaman PNS tentang hak dan kewajiban serta pelaksanaan penyelesaian masalah PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengalami penurunan 0,16%, karena masih cukup besar jumlah PNS yang mengajukan ijin perceraian, serta masih kecil kesadaran PNS terkait dengan pemahaman hak dan kewajibannya sehingga masih ada beberapa PNS yang di jatuhkan hukuman disiplin.
8. Meningkatnya proses kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun tepat waktu serta pemrosesan mutasi/penataan PNS dengan kegiatan pemrosesan pensiun naik 0,39, sedangkan untuk pemrosesan mutasi atau penataan PNS mengalami juga mengalami kenaikan yang cukup besar 26,7% karena ada pembentukan OPD baru sehingga ada penataan pegawai secara menyeluruh di semua organisasi perangkat daerah.
9. Meningkatnya proses kenaikan pangkat (KP) mengalami penurunan 0,084% dan PMK (peninjauan masa kerja golongan) mengalami penurunan 2%, proses kenaikan pangkat dan PMK yang difasilitasi oleh BKD, untuk penentu akhir atau surat keputusan yang mengeluarkan adalah BKN dan masih ada permasalahan dari usulan KP PNS yang belum memenuhi persyaratan yang disyaratkan atau ditentukan sehingga menjadi batal.
10. Meningkatnya tertib administrasi PTT, yang dari jumlah untuk pengelolaannya cenderung turun 1,04%. Karena PTT yang ditetapkan dengan SK Bupati secara kuantitas atau jumlah semakin berkurang sesuai batas usia pemberhentian PTT, karena sudah tidak ada lagi pengangkatan PTT mulai tahun 2005.
11. Meningkatnya tertib pengelolaan arsip CPNS dan PNS mengalami penurunan 0,03%. pengelolaan arsip ditentukan oleh pergerakan mekanisme kepegawaian secara keseluruhan dari OPD sampai ke unit kerja di Kabupaten Banyumas.
12. Meningkatnya kualitas SDA aparatur dengan Diklat dan sejenisnya mengalami penurunan 0,78%, tugas belajar turun 0,02%, Ijin Belajar, keterangan belajar, ket. Pendidikan turun 0,85%, keterangan penggunaan gelar turun 0,13% dan ujian kedinasan naik 0,89%
13. Meningkatnya pelayanan penilaian dan penetapan angka kredit untuk jabatan fungsional non guru dan non bidang kesehatan mengalami kenaikan 0,43% kegiatan ini disesuaikan dengan pengajuan penilaian oleh PNS fungsional yang akan menghitung dan menetapkan angka kredit jabatan fungsional baik itu untuk pemeliharaan angka kredit maupun untuk pengajuan kenaikan pangkat.
14. Penyusunan formasi dan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi melalui kegiatan pelaksanaan penyusunan formasi di 259 unit kerja rerealisasi 100%, Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Sumpah Janji PNS 575 dan Pengambilan Sumpah Janji PNS yang belum diambil sumpah 125 orang terealisasi semuanya 100%

serta pembuatan aplikasi E-Formasi juga teralisasi 100%, bahwa sesuai yang dengan Uandang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara penyusunan alokasi formasi diajukan melalui E-Formasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang dirinci per 1 (satu) tahun dengan mengedepankan sekala prioritas kebutuhan , dan untuk pengadaan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas hanya menerima limpahan Bidan PTT dari Kementrian Kesehatan yang ada di Kabupaten Banyumas sebanyak 282 orang dan sudah dilaksanakan tes penerimaan CPNS pengadaan untuk formasi Bidan yang diselenggarakan oleh kementrian Kesehatan yang kemudian hasil pengadaan akan diserahkan ke Kabupaten yang berketempatan di wilayah tersebut, tetapi sampai akhir tahun 2016 belum ada penyerahan hasil tes pengadaan pegawai untuk Bidan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas, sementara untuk pengadaan pegawaidari formasi umum belum ada, karena adanya kebijakan pemerintah pusat terkait moratorium ASN dari tahun 2015-2019.

15. Pemberian pembekalan bagi PNS yang akan memasuki purna tugas mengalami kenaikan 0,075%. Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas di Pemerintah Kabupaten Banyumas diharapkan bisa memberi bekal sepiritual maupun kesiapan mental setelah selesai mengabdikan bertugas dan kembali ke pada masyarakat, kegiatan ini juga terlaksana tergantung pada keadaan keuangan daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada PNS.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dari Rencana Kerja Anggaran yang melalui proses pembahasan anggaran melalui KUA-PPAS kemudian ditetapkan menjadi DPA SKPD dengan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 *setelah Perubahan* sebesar Rp 37.821.991.886,- dapat direalisasikan Rp 10.145.802.999,- atau 26,83%, dapat dilihat tabel dibawah :

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi	%	Sisa	%
1	BELANJA	37.821.991.886	10.145.802.999	26,83	27.676.792.955	272,8
1.1	Belanja tidak langsung (Non Program / Gaji)	34.141.991.886	6.937.516.103	20,32	27.310.356.783	358,1
	- Belanja Pegawai	34.141.991.886	6.937.516.103	20,32	27.310.356.783	358,1
1.2	Belanja langsung (Program-Kegiatan)	3.680.000.000	3.208.286.896	87,18	471.713.104	14,70
	- Belanja Pegawai	795.292.000	689.411.000	86,69	105.881.000	15,36
	- Belanja Barang dan Jasa	2.679.708.000	2.325.690.896	86,79	354.017.104	15,22
	- Belanja Modal	205.000.000	193.185.000	94,24	11.815.000	6,18

Dari belanja tidak langsung dan belanja langsung diurakan menjadi belanja operasional dan belanja modal dapat dilihat pada tabel dibawah dengan rincian :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	BELANJA	37.821.991.886	10.145.802.999	26,83
1.1	Belanja Operasional	37.616.991.886	9.952.617.999	26,46
	- Belanja Pegawai	34.937.283.886	7.626.927.103	21,83
	- Belanja Barang dan Jasa	2.679.708.000	2.325.690.896	86,79
1.2	Belanja Modal	205.000.000	193.185.000	94,23
	- Belanja Peralatan dan mesin	205.000.000	193.185.000	94,23

Sedangkan informasi biaya yang dibutuhkan dalam mewujudkan sasaran yang terinci dalam anggaran dan realisasi per program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran, Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I.	Non Program (Gaji/Tunjangan)	34.141.991.886	6.937.448.603	20,32
II.	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi kantor dan sarana parasarana aparatur.	1.160.000.000	1.076.614.297	92,81
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	862.400.000	796.770.964	92,39
	1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	187.700.000	160.376.629	85,44
	2. Penyediaan bahan logistik kantor.	299.015.000	273.608.500	91,5
	3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	157.125.000	150.694.835	95,91
	4. Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan.	60.000.000	60.000.000	100
	5. Pengendalian dan penatausahaan keuangan daerah.	158.560.000	152.091.000	95,92
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	297.600.000	279.843.333	94,03
	1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.	150.000.000	144.435.000	96,29

	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	45.000.000	42.534.300	94,52
	3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	72.500.000	71.376.583	98,45
	4. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.	30.100.000	21.497.450	71,42
III.	Sasaran Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dibidang konseptual, teknis dan fungsional	1.255.000.000	978.415.344	77,96
	a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	48.785.622	97,57
	1. Bintek penyelesaian permasalahan kepegawaian	50.000.000	48.785.622	97,57
	b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.205.000.000	929.629.722	77,15
	1. Pengembangan sumber daya aparatur	955.000.000	758.134.608	79,39
	2. Penyusunan formasi dan pengadaan pegawai	250.000.000	171.495.114	68,59
IV.	Sasaran : Meningkatkan kesejahteraan dan tertib administrasi pegawai	658.000.000	581.159.603	88,32
	a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	658.000.000	581.159.603	88,32
	1. Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	135.000.000	131.360.308	97,32
	2. Pemrosesan pensiun dan penataan PNSD	103.000.000	91.459.738	88,79
	3. Pemrosesan kenaikan pangkat PNSD.	122.000.000	110.709.939	90,75
	4. Pengelolaan administrasi PTT	160.000.000	136.379.500	85,24
	5. Penyusunan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional non guru dan non	88.000.000	67.639.118	76,86

	bidang kesehatan			
	6. Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas.	50.000.000	43.611.000	87,22
V.	Sasaran : Meningkatkan kualitas penempatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional	370.000.000	334.934.659	90,52
	a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.	370.000.000	334.934.659	90,52
	1. Pemrosesan jabatan struktura dan fungsional.	370.000.000	334.934.659	90,52
VI.	Sasaran : terselesaikannya masalah kepegawaian	150.000.000	149.840.558	99,89
	a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.	150.000.000	149.840.558	99,89
	1. Pembinaan dan penyelesaian masalah PNS	150.000.000	149.840.558	99,89
VII.	Sasaran : Tersedianya data kepegawaian yang akurat dan up to date	87.000.000	86.767.867	99,73
	a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.	87.000.000	86.767.867	99,73
	1. Akurasi data PNS guru dan non guru	60.396.000	60.199.367	99,67
	2. Pengelolaan arsip CPNS dan PNS	26.604.000	26.568.500	99,87
I+II+III+IV+V+VI+VII. JUMLAH ANGGARAN		37.821.991.886	10.145.802.999	26,83
Sisa Anggaran			27.676.810.955	

Dari realisasi anggaran APBD 2016 untuk mebiayai tugas dan fungsi BKD yaitu sebagai penglelolaan manajemen kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Banyumas secara umum kegiatannya sudah terlaksana, dari anggaran yang di kelola **Rp.37.821.991.886,-** terealisasi **Rp. 10.145.802.999,-** yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, **dimanan ada**

efisiensi pada belanja tidak langsung (Belanja Non program/Gaji) mempunyai sisa cukup besar Rp.27.204.543.283,- hal tersebut disebabkan untuk penganggaran gaji untuk PNS, dimana BKD menyipkan anggaran tersebut untuk mutasi PNS dari luar yang masuk ke Kabupaten Banyumas dan persiapan penggajian CPNS dari pengadaan pegawai dari Bidan PTT dan tenaga harian lepas penyuluh pertanian yang sudah melakukan tes pengadaan CPNS tetapi samapai tahun anggaran berakhir untuk tahun 2016 belum ada informasi pengumuman dari Kementrian Kesehatan dan Pertanian sehingga tidak dapat di pergunakan dan untuk. belanja langsung sebesar Rp.472.249.672,- atau 14,7%

Dari dua komponen belanja diatas maka untuk belanja pegawai realisasi Rp 7.626.927.103,- sisa Rp.27.310.356.783,- (358,1%) realisasi belanja barang jasa Rp 2.325.690.896 sisa Rp 354.017.104 (15,22%) ,- dan realisasi belanja modal Rp 193.185.000,- sisa 11.815.000,- (6,12%) besarnya sisa belanja pegawai karena anggaran yang digunakan untuk rencana gaji PNS yang mutasi dari luar masuk ke Kabupaten Banyumas tidak terealisasi semua serta sisa dari honor PNS, honor non PNS dan uang lembur tidak terpakai sedangkan untuk belanja barang jasa terdapat efisiensi hampir ada semua pada belanja barang jasa kecuali pada belanja sewa pakaian adat/tradisional, belanja makan dan minum peserta diklat/bintekdan honorarium jasa profesi dan untuk efisiensi di belanja modal yaitu ada barang yang tidak terbeli yaitu DVD player tidak dibeli karena kebutuhan kurang prioritas dan ada selisih antara HPS dan nilai kontrak/penawaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Banyumas telah disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BKD Kabupaten Banyumas menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented Government*).

Simpulan dan sasaran atas hasil pengukuran kinerja tahun 2016 diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja Tahun 2016 dapat dikategori **Sangat Baik (96,5%)** dengan hasil hitungan capaian input, output dan outcome yang ada. sebagai berikut

1. Capaian kinerja tertinggi ada pada sasaran penyelesaian permasalahan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan capaian kinerja rata-rata 99% (Sangat baik) dengan 6 (enam) indikator capaian kinerja tersebut rata-rata telah memenuhi target penyelesaian permasalahan dari pembinaan PNS dan masih ada indikator yang harus menjadi perhatian serius yaitu terkait dengan pemberian ijin dan keterangan untuk melakukan perceraian yang mengalami kenaikan dari target 30 orang/ kasus menjadi 38 orang/kasus dan hukuman disiplin dari target 30 kasus menjadi 31 kasus maka harus ditingkatkan pembinaan maupun pengawasannya terhadap aparatur sipil negara terhadap kedisiplinannya sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
2. Sedangkan capaian yang paling kecil persentasenya di bandingkan dengan sasaran yang lain yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur rata-rata dengan capaian 91,7 % (sangat baik) capaian tersebut diukur dari 3 (tiga) capaian indikator dan indikator yang melebihi target adalah indikator pengembangan sumber daya aparatur dan peningkatan kapasitas SDA dengan bimbingan teknis penyelesaian permasalahan kepegawaian guna meningkatkan pemahaman petugas dalam menyelesaikan permasalahan kepegawaian pada unit kerja sedangkan capaian yang masih rendah adalah penyusunan formasi dan pengadaan pegawai dimana sampai tahun 2016 tidak ada pengadaan pegawai dari formasi umum.

Saran :

1. Walaupun capaian kinerja tahun 2016 termasuk dalam kategori **Sangat baik** namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.

Salah satu kendala adalah belum optimalnya perumusan sasaran selaras dengan kegiatan dan program, dan belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, beberapa indikator juga belum menyajikan penentuan target secara tepat. Dengan kata lain pengukuran kinerja tidak akan mampu menggambarkan capaian kinerja yang senyatanya apabila indikator kinerja tidak dirumuskan dengan tepat.